

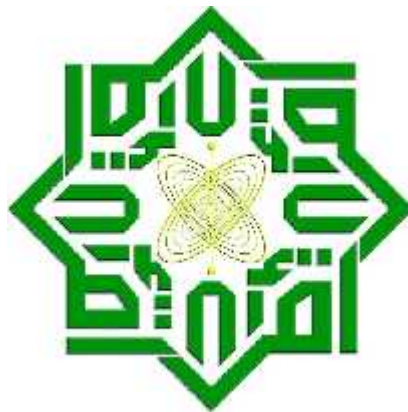
**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK BENDAHARAWAN PEMERINTAH
DI KABUPATEN ROKAN HILIR**

SKRIPSI

OLEH :

MIRWIYA AFNI

NIM : 109 7300 6910



PROGRAM S.1

JURUSAN AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2013

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK BENDAHARAWAN PEMERINTAH
DI KABUPATEN ROKAN HILIR**

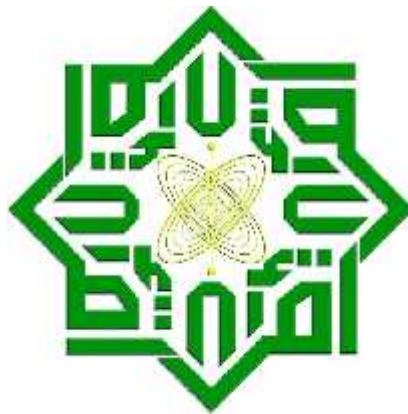
SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Satu (S1) Pada Fakultas
Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

OLEH :

MIRWIYA AFNI

NIM : 109 7300 6910



PROGRAM S.1

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2013

ABSTRAK

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bendaharawan Pemerintah di Kabupaten Rokan Hilir

Oleh :

Mirwiya Afni

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah di Kabupaten Rokan Hilir. Faktor-faktornya yaitu pengetahuan perpajakan, pelayanan perpajakan dan sanksi pajak sebagai variabel independen, serta satu faktor sebagai variabel dependen yaitu kepatuhan perpajakan. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak bendaharawan di Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan sampel dari penelitian ini merupakan bendaharawan pengeluaran. Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan jumlah responden. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung sebanyak 34 kuesioner dan berdasarkan hasil penyebaran terdapat 32 kuesioner yang dapat diolah dan yang lainnya dianggap gugur karena ada beberapa item pertanyaan yang tidak dijawab secara lengkap. Data yang diperoleh dianalisis dengan regresi berganda dengan menggunakan program SPSS versi 19.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, pelayanan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan pada tingkat signifikan <0.05 . Dimana pengetahuan perpajakan memiliki nilai signifikan sebesar 0,011, pelayanan perpajakan dengan nilai signifikannya yaitu sebesar 0,009 dan sanksi pajak dengan nilai signifikan sebesar 0,006. Sehingga persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 82,1% dan sisanya 17,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model ini.

Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bendaharawan Pemerintah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kelapangan dalam berfikir kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan baik.

Selanjutnya penulis bershalawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulis tugas akhir ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tugas akhir ini jauh dari sempurna dan tidak tertutup kemungkinan terdapat kesalahan dan kesilapan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan demi kesempurnaan tugas akhir ini dan menjadi pengetahuan bagi penulis dimasa yang akan datang.

Dalam upaya penyelesaian tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak.

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir selaku Rektor UIN Suska Riau.
2. Bapak Mahendra Romus, SP. M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
3. Bapak Dony Martias, SE, MM selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 dan selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu dan

kesempatan dalam mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

4. Ibuk Desrir Miftah, SE, MM, Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
5. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
6. Staf Akademik dan Umum Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
7. Teristimewa kepada Ayahanda H.Misran dan Ibunda Hj.Iriani, SPd yang telah banyak memberikan doa dan fasilitas yang sangat cukup untuk penulis.

Pekanbaru, Mei 2013

Penulis

Mirwiya Afni

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	9

BAB II TELAAH PUSTAKA

A. Pengertian dan Fungsi Pajak	11
B. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia.....	14
C. Pengertian Wajib Pajak Bendaharawan Pemerintah	15
D. Sikap Kesiapan Wajib Pajak Membayar Pajak	16
E. Hak dan Kewajiban Bendaharawan Pemerintah.....	17
a. Hak bendaharawan	18
b. Kewajiban bendaharawan	19
F. Pengetahuan Perpajakan	21
G. Pelayanan Perpajakan.....	22
H. Sanksi Pajak	25
I. Kepatuhan Perpajakan	28
J. Pajak Dalam Islam.....	32
K. Pengembangan Hipotesis	35
I. Model Penelitian	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel	39
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	39
C. Jenis dan Sumber Data	41
D. Teknik Pengumpulan Data dan Pengukuran Variabel	42
E. Rancangan Kuisisioner	43
a. Pengetahuan Perpajakan.....	43
b. Pelayanan Perpajakan.....	44
c. Sanksi Pajak	44
d. Kepatuhan Bendaharawan Pemerintahan.....	44
F. Metode Analisis Data	45
G. Uji Kualitas Data	46
a. Uji Reabilitas	46
c. Uji Validitas	46
H. Pengujian Asumsi Klasik	47
a. Uji Multikorelasi	47
b. Uji Heteroskedastisitas.....	47
c. Uji Autokorelasi	48
I. Pengujian Hipotesis	48
a. Uji t.....	48
b. Uji F (secara bersama-sama).....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kuisisioner dan Demografi	50
B. Statistik Deskriptif.....	51
C. Uji Kualitas Data	52
a. Uji Validitas Data	53
b. Uji Reabilitas Data	63
D. Uji Normalitas Data	64
E. Hasil Uji Asumsi Klasik	52

a. Multikorelasi	66
b. Uji Autokorelasi	67
c. Uji Heterokedastisitas.....	68
F. Analisis Regresi	69
G. Uji Hipotesis dan Pembahasan	71
a. Uji F (secara bersama-sama)	71
b. Uji Parsial ((t-test).....	67
c. Uji Heterokedastisitas.....	68

BAB V PENUTUP

a. Kesimpulan.....	77
b. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABELHalaman

Tabel I.1.	Jumlah Wajib Pajak	4
Tabel II.1.	Sanksi Administrasi (Bunga	26
Tabel II.2.	Sanksi Administrasi (Denda)	26
Tabel II.3.	Sanksi Administrasi (Kenaikan 50%)	27
Tabel II.4.	Sanksi Administrasi (Kenaikan 100%)	27
Tabel IV.1.	Sampel dan Tingkat Pengembalian.....	50
Tabel IV.2.	Demograsi Responden	51
Tabel IV.3.	Statistik Deskriptif	68
Tabel IV.4.	Validitas Instrumen Pengetahuan Perpajakan(X1)	54
Tabel IV.5.	Persentase Jawaban responden55	
Tabel IV.6.	Validitas Instrumen Pelayanan Perpajakan.	56
Tabel IV.7.	Persentase Jawaban Responden	57
Tabel IV.8.	Validitas Instrumen Sanksi Pajak (X3).....	58
Tabel IV.9.	Persentase Jawaban Responden	60
Tabel IV.10.	Validitas Instrumen Kepatuhan Perpajakan.....	61
Tabel IV.11.	Persentase Jawaban Responden	62
Tabel IV.12.	Hasil Uji Reabilitas	64
Tabel IV.13.	Nilai Tolerance dan VIF	66
Tabel IV.14.	Statistik Durbin-Watson	67
Tabel IV.15.	Uji F variabel	71
Tabel IV.16.	Uji t	73
Tabel IV.17.	Koefisien Determinasi	75

DAFTAR GAMBAR

GAMBARHalaman

Tabel IV.1. Normal Probability Standardizer Residual..	65
Tabel IV.2. Scatter Plot.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah suatu organisasi yang didalamnya terdapat rakyat, wilayah yang permanen dan pemerintah yang syah. Negara juga merupakan sosial (masyarakat) yang diatur secara konstitusional (yang berdasarkan undang-undang) untuk mewujudkan kepentingan bersama. Dalam mencapai tujuan dari suatu negara dibutuhkan dana yang besar untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara bagi penyelenggaraan kepentingan umum. Penyelenggaraan kepentingan umum ini harus dilakukan dengan sistem pengelolaan keuangan yang secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab. Bendahara memiliki fungsi dan tanggung jawab sebagai pengelola keuangan negara tersebut sehingga diharapkan bendahara mampu mengelola sumber daya keuangan negara secara efesien.

Sumber penerimaan negara berasal dari dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari faktor internal adalah pajak. Pajak merupakan konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007).

Sedangkan sumber pendapatan negara yang berasal dari faktor eksternal adalah pinjam luar negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan

penerimaan internal. Pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan pajak karena pajak merupakan sumber utama pendapatan dari suatu negara. Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang langsung dipungut dari berbagai objek pajak dan mempunyai fungsi penting terutama untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Hasil dari penerimaan pajak akan dikelola dan digunakan oleh pemerintah guna menjamin kesejahteraan masyarakatnya.

Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Proporsi penerimaan pajak terhadap APBN dalam tiga tahun ini yaitu dari tahun 2008 hingga tahun 2010. Pada tahun 2008 pajak menyumbang 76% porsi penerimaan negara, tahun 2009 sebesar 74% sedangkan pada tahun 2010 pajak menyumbang sebanyak 78% porsi penerimaan negara(www.depkeu.go.id).

Sejak 1 Januari 1984 sistem pemungutan pajak di Indonesia di reformasi dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Self Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutangnya tanpa campur tangan fiskus. Sehingga masyarakat yang menjadi subjek pajaknya harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajaknya. Hal ini berdasarkan

Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 12 Ayat (1) dan (2) tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Ayat (1) yang berbunyi :”Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak”. Sedang ayat (2) berbunyi :”Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Self Assessment System ini menuntut wajib pajak untuk patuh dalam menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kepatuhan yang diharapkan adalah kepatuhan yang suka rela bukan kepatuhan yang dipaksakan. Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan peraturan perpajakan dan pelayanan yang baik dan cepat terhadap Wajib Pajak.

Menurut UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008 mengenai pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh bendaharawan pemerintah. Bendaharawan pemerintah ini selain menjalankan fungsi sebagai pembendaharawan, ia juga memiliki kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.

Banyak kasus-kasus pajak yang terjadi di Indonesia yang membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir untuk membayar pajak. Kondisi tersebut

dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena para wajib pajak rugi jika membayar pajak tetapi dana pajak tidak dijalankan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, beberapa masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari pajak. Fakta yang terjadi adalah tingkat kepatuhan penyampaian SPT di Provinsi Riau tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar.

Tabel I.1.
Jumlah Wajib Pajak

Tahun	2011	2012
Jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar	442.930	594.135
SPT diterima	281.340	544.243
Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan	63,52%	62,5%

Sumber : Panutan Pajak Pekanbaru Provinsi Riau

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masih ada wajib pajak yang tidak menyetorkan kewajiban pajak terhutangnya kepada kas negara. *Self Assessment System* ini tidak terlaksana sesuai dengan yang diharapkan karena dalam kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak atau belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya. Hal ini disebabkan karena ketidakpatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Banyak faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak tersebut. Hal ini dapat dilihat dari peneliti terdahulu.

Menurut penelitian Permatasari Bonasani (2011) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan perpajakan dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah di wilayah Provinsi Riau. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan

perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah dan pelayanan aparat pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bendaharawan.

Kepatuhan Perpajakan menurut Peraturan Menteri Keuangan (192/KMK.03/2007) Pasal 1 yaitu wajib pajak dikatakan patuh apabila : (1) tepat waktu dalam penyampaian SPT, (2) tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, (3) tidak pernah dipidana dalam lima tahun terakhir, (4) melakukan kewajibannya dengan sukarela sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Semakin puas wajib pajak terhadap pelayanan perpajakan, semakin luas pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan dan perundang-undangan perpajakan, semakin tinggi tingkat sanksi maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Salah satu yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah terhadap kewajiban perpajakannya adalah dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak itu sendiri. Pengetahuan wajib pajak ini dapat ditingkatkan dengan bimbingan fiskus saat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sangatlah penting untuk dapat melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pelayanan juga memiliki pengaruh dalam pembentukan kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah. Pelayanan yang berkualitas terhadap wajib pajak adalah usaha yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak untuk melayani wajib pajak secara maksimal agar wajib pajak tidak mengalami kebingungan saat membayar pajak. Aparat pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah,

adil dan tegas setiap saat kepada wajib pajak. Sehingga wajib pajak dapat mengenal pajak dari pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak.

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ketahun. Keberhasilan Ditjen Pajak dalam melaksanakan tugas sangat bergantung dari kemampuannya untuk dapat diterima, diakui dan dipercaya oleh masyarakat sebagai suatu organisasi yang profesional dalam menjalankan tugasnya. Pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak berkaitan dengan sikap wajib pajak. Proses perpajakan melibatkan aparat pajak dan wajib pajak membuat pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak turut membentuk sikap (*attitude*) wajib pajak akan memiliki sikap yang positif terhadap proses perpajakan. Namun jika pelayanan yang diberikan tidak baik, hal itu akan membuat wajib pajak enggan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Upaya yang harus dilakukan oleh aparat pajak yaitu memberikan kualitas layanan yang mampu memberikan pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi kepada wajib pajak, sehingga dengan langkah tersebut diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya dalam membayar pajak akan terbentuk serta langkah permulaan untuk menuju kearah pelaksanaan *self assessment* yang murni dapat tercapai.

Selain itu kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah juga dapat ditingkatkan dengan menerapkan sanksi yang tegas. Sanksi pajak yang tegas akan mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak karena wajib pajak merasa memiliki beban yang harus dibayar atas penghasilan yang tidak dilaporkan apabila nantinya ditemukan oleh administrasi pajak akan lebih besar daripada keuntungan

yang mereka peroleh dari penghematan pajak yang dinikmati sekarang karena adanya penghasilan yang tidak dilaporkan. Dengan sanksi yang tegas dari aparat pajak terhadap wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan (UU No.36 Tahun 2008).

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu apabila penelitian sebelumnya menggunakan wajib pajak orang pribadi sebagai alat ukur, maka penulis mengukur dari wajib pajak bendaharawan instansi pemerintah. Peneliti ingin menguji bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan perpajakan dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bendaharawan instansi pemerintah.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji secara ilmiah mengenai kepatuhan wajib pajak. Dengan penelitian yang berjudul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bendaharawan Pemerintah di Kabupaten Rokan Hilir”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengetahuan perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah ?

2. Apakah pelayanan perpajakan yang memuaskan terhadap wajib pajak bendaharawan pemerintah mempengaruhi kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban ?
3. Apakah sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak bendaharawan pemerintah mempengaruhi kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji adanya pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah.
2. Untuk menguji adanya pengaruh pelayanan aparat pajak yang memuaskan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah.
3. Untuk menguji adanya pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat bagi penulis

Manfaat khusus bagi penulis untuk menambah wawasan penulis mengenai pengaruh antara Pengetahuan Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan

Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bendaharawan Pemerintah dalam membayar pajak.

2. Manfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak sehingga dapat digunakan sebagai evaluasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak atau memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Manfaat bagi kalangan akademis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan ilmiah dan informasi yang berguna serta sebagai bahan referensi untuk penelitian yang sama dimasa yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara umum bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara ringkas isi masing-masing BAB dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Bab ini akan menguraikan aspek teoritis yang menjadi dasar pola berpikir dalam melakukan penelitian, penelitian-penelitian terdahulu serta pengembangan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini akan menjelaskan metode penelitian yang meliputi obyek penelitian dan penentuan sampel, jenis dan sumber data, dan pengujian hipotesis.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memuat hasil penelitian yang diperoleh dari analisis data serta pembahasan hasil penelitian untuk setiap variabel yang digunakan dalam penelitian.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan atas materi dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta keterbatasan penelitian dan sarana-sarana yang diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Pengertian dan Fungsi Pajak

Menurut UU 1945 Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Angka 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut pendapat Prof.Dr.Rochman Soemitro,SH (dalam Gusfahmi,2007: 25), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut pendapat P.J.A Adriani (dalam Gusfahmi,2007:25), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat dituju dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Penentuan kebijakan pembayaran pajak adalah wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama eksekutif dan hasil keputusan bersama dituangkan dalam bentuk UU Perpajakan.

Tujuannya adalah mengikat semua orang untuk mematuhi dan tercipta keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Sedangkan fungsi dari pajak itu sendiri bagi masyarakat adalah sebagai berikut (Mardiasmo,2008:8) :

1. Fungsi finansial (*budgeter*)

Fungsi pajak adalah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran belanja negara guna kepentingan dan keperluan seluruh masyarakat. Tujuan ini biasa disebut “*revenue adequacy*”, yaitu bahwa pemungutan pajak tersebut tujuannya untuk mengumpulkan penerimaan yang memadai atau yang cukup untuk membiayai belanja negara. Dengan demikian fungsi finansial yaitu pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah (guna mendapatkan uang sebanyak-banyaknya untuk pengeluaran pemerintah dan pembangunan negara).

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Fungsi mengatur bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Terutama dalam menyusun undang-undang pajak perlu diusahakan agar ketentuan yang dirumuskan jangan menimbulkan interpretasi yang berbeda, antara fiksi dan wajib pajak. Fungsi ini juga digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh dari fungsi mengatur (*regulerend*) ini adalah sebagai berikut :

a) Bidang ekonomi

Ketika pemerintah mengharapkan agar industri dalam negeri tidak mati dan tidak mampu bersaing dengan produksi dari luar negeri, maka pemerintah membuat peraturan berupa pengenaan tarif bagi produk luar negeri tersebut dan bahkan pemerintah memberikan insentif kepada perusahaan industri dalam negeri.

b) Bidang moneter

Pemerintah dapat memberikan pengampunan pajak, dengan tujuan untuk merangsang atau memancing masuknya aliran dana (pemilik lokal) dari luar negeri kedalam negeri.

c) Bidang sosial

Pajak dikenakan terhadap barang-barang mewah, seperti mobil sehingga masyarakat yang ingin hidup mewah memikul beban biaya yang tinggi.

d) Bidang budaya

Pemerintah dapat memberikan insentif atau pengurangan pajak terhadap orang pribadi dan perusahaan yang usahanya untuk mengangkat budaya masyarakat Indonesia yang mungkin akan punah.

B. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi empat yaitu *Official assessment system*, *Semi Self assessment system*, *Self assessment system* dan *With holding system* (Ilyas dan Burton, 2002:30). *Official assessment system* yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh seseorang. *Semi Self assessment system* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya utang pajak. Sedangkan *Self assessment system* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. *With holding system* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang.

Namun di Indonesia saat ini sistem yang digunakan adalah *Self assessment system*. *Self assessment system* terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Inggris yakni *self* yang artinya sendiri dan *to assess* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Dengan demikian maka pengertian *self assessment* adalah menghitung atau menilai sendiri. Jadi Wajib Pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya (Nurmantu, 2003:108). *Self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakan dimulai dari mendaftarkan diri di KPP (Kantor Pelayanan Pajak)

untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar, menyetor pajak tersebut ke Bank Persepsi atau Kantor Giro Pos dan melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktorat Jendral Pajak (Nurmantu, 2003:109).

Secara konsepsional sistem *self assessment* tidak berjalan sendirian, karena harus didukung perangkat administrasi perpajakan yang telah mengikuti prinsip-prinsip administrasi modern. Dengan adanya sistem baru ini maka pihak administrator hanya bertindak sesuai fungsinya yaitu melakukan pengawasan, pengendalian dan penelitian apabila ada kecurigaan bahwa wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perundang-undangan.

Namun kenyataannya banyak wajib pajak terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga ada istilah wajib pajak efektif dan wajib pajak non efektif. Wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa atau Tahunan. Sedangkan wajib pajak non efektif adalah wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Surat Edaran SE-01/PJ.9/20 tentang Pengawasan Penyampaian SPT Tahunan disebutkan bahwa jumlah wajib pajak efektif adalah selisih antara jumlah wajib pajak terdaftar dengan jumlah wajib pajak non efektif.

C. Pengertian Wajib Pajak Bendaharawan Pemerintah

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 3. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 pasal 3a, wajib pajak adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Dalam pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah dan yang bekerja di BUMN atau pemerintah, baik pusat maupun daerah yang mengelola APBN/APBD dan ditunjuk oleh atasannya untuk menjadi pejabat bendaharawan dengan Surat Keputusan Pengangkatan (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003).

D. Sikap Kesiediaan Wajib Pajak Membayar Pajak

Sikap seseorang terhadap objek tertentu merupakan pandangan atau perasaan, namun disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai terhadap objek tersebut. Bisa dikatakan sikap merupakan kesiediaan bereaksi terhadap sesuatu hal.

Struktur sikap terdiri atas tiga aspek atau komponen yang saling menunjang, yaitu komponen kognitif, afektif dan konatif (Azwar, 2005:50) :

1. Komponen kognitif

Yaitu kepercayaan seseorang mengenai sesuatu yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap. Ketika kepercayaan itu telah terbentuk, maka akan menjadi dasar pengetahuan seseorang mengenai sesuatu yang diharapkan dari objek tersebut.

2. Komponen efektif

Yaitu menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap. Secara umum, komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu.

3. Faktor eksternal

Yaitu keadaan yang ada diluar individu yang merupakan stimulus (rangsangan) untuk membentuk atau mengubah sikap. Sebagai contoh: peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak (*e-payment*), pendaftaran NPWP (*e-registration*), serta pelaporan (*e-filing*) Surat Pemberitahuan (SPT), sehingga Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pajak, namun cukup melakukan kegiatan tersebut secara *online* dari rumah/kantor mereka. Dengan demikian, persinggungan antara wajib pajak dengan petugas pajak dapat diminimalisir dan bermanfaat bagi semua pihak. Suasana ini sangat perlu untuk dilakukan kewajiban perpajakan baik dari sisi pemerintah maupun wajib pajak untuk memenuhinya.

E. Hak dan Kewajiban Bendaharawan Pemerintah

Menurut UU No.1 Tahun 2004 bendahara umum daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. Bendahara

ini terbagi atas dua yaitu bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Bendahara penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN atau APBD pada kantor atau satuan kerja kementerian negara atau lembaga atau pemerintah daerah.

Sedangkan bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara atau daerah dalam rangka pelaksanaan APBN atau APBD pada kantor atau satuan kerja kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah.

1. Hak bendaharawan

Bendaharawan sebagai wajib pajak memiliki hak (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) :

- a. Hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikan kepada Ditjen Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Disamping itu pihak lain yang melakukan tugas dibidang perpajakan juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak, termasuk tenaga ahli seperti ahli bahasa, pengacara yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan.
- b. Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak.

- c. Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan mengangsur pembayaran pajak.
- d. Dengan alasan-alasan tertentu, wajib pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan baik PPh Badan maupun PPh Pasal 21.
- e. Wajib pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai wajib pajak patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh sejak tanggal permohonan.
- f. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar atau nihil. Jika wajib pajak tidak sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut. Selanjutnya apabila belum puas dengan keputusan keberatan tersebut maka wajib pajak dapat mengajukan banding. Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam sengketa pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

2. Kewajiban bendaharawan

- a. Memotong PPh Pasal 21/26

Dasar Hukumnya adalah Pasal 21 ayat (1) huruf b UU PPh “Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang

pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan”. Bendahara pemerintah termasuk bendahara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia diluar negeri yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.

b. Memotong PPh Pasal 22

Dasar Hukum adalah Pasal 22 ayat (1) UU PPh “Menteri Keuangan dapat menetapkan bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang”.

c. Memotong PPh Pasal 23/26

Dasar hukumnya adalah pasal 23 (1) huruf c dan Pasal 26 ayat (1).

d. Memungut PPN dan PPnBM

Dasar Hukumnya adalah Pasal 1 angka 27 UU PPN “Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak danatau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah tersebut”.

F. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan terbagi atas dua yaitu pengetahuan teknis dan pengetahuan atas manfaat pajak itu sendiri. Menurut Harjantho,2008 (dalam Natalia,2008:15), pengetahuan sebagian besar masyarakat kita akan masalah perpajakan sangatlah minim, sehingga bisa dikatakan sebenarnya masyarakat kita masih buta tentang masalah perpajakan ini. Menurut Nasution(dalam Natalia,2008:18), masyarakat harus mempelajari bagaimana ketentuan pajak sesuai dengan apa yang diatur oleh peraturan pajak serta mengisi berbagai macam formulir yang rumit dan kompleks.

Rakyat akan membayar pajak kalau mutu dan pelayanan pemerintah itu baik dan sebaliknya kalau tidak mereka akan menolak membayar pajak. Pelayanan disini diartikan pelayanan dari pemerintah. Menurut Ancok (dalam Natalia,2008:20), kesediaan masyarakat untuk membayar pajak dapat ditingkatkan apabila seluruh aparat pemerintah meningkatkan dan memperbaiki mutu pelayanan. Penting pula diketahui keinginan para Wajib Pajak mengenai penggunaan uang pajak yang mereka bayarkan. Wajib Pajak perlu menerima informasi bahwa dana pajak yang berasal dari Wajib Pajak digunakan pemerintah untuk membangun jalan dan sekolah, membayar gaji polisi, guru dan juru rawat rumah sakit, membangun dam untuk pengairan kebutuhan pertanian dan makanan pokok rakyat. Sehingga wajib pajak menerima manfaat, walaupun tidak secara langsung.

G. Pelayanan Perpajakan

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan (Boediono,2003:60). Hakikat pelayanan umum adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan instansi pemerintah dibidang pelayanan umum.
2. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna (efesien dan efektif).
3. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Sedangkan pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus.Hakikat dari pelayanan umum yang berkualitas adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dibidang perpajakan.
- b. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna.

- c. Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Rangkaian kegiatan terpadu yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan adalah sebagai berikut (Ana Aime,2012:10) :

- a. Pelayanan umum yang sederhana

Pelayanan umum berkualitas apabila pelaksanaannya tidak menyulitkan, prosedurnya tidak banyak seluk beluknya, persyaratannya mudah dipenuhi pelanggan.

- b. Pelayanan umum yang terbuka

Aparatur yang bertugas melayani pelanggan harus memberikan penjelasan sejujur-jujurnya, apa adanya dalam peraturan atau norma, jangan menakut-nakuti, jangan merasa berjasa dalam memberikan pelayanan agar tidak timbul keinginan mengharapakan imbalan dari pelanggan.

- c. Pelayanan umum yang lancar

Untuk menjadi lancar diperlukan saran yang menunjang kecepatan dalam menghasilkan output.

d. Pelayanan umum yang dapat menyajikan secara tepat

Yaitu tepat arah, tepat sasaran, tepat waktu, tepat jawaban dan tepat dalam memenuhi janji. Misalnya Kantor Pelayanan Pajak dalam melakukan penagihan pajak tepat pada waktu.

e. Pelayanan umum yang lengkap

Lengkap berarti tersedia apa yang diperlukan oleh pelanggan. Untuk dapat menjamin pelayanan yang berkualitas harus didukung sumber daya manusia dan sarana yang tersedia.

f. Pelayanan umum wajar

Pelayanan umum yang wajar berarti tidak ditambah-tambah menjadi pelayanan yang bergaya mewah, tidak dibuat-buat, pelayanan biasa seperlunya sehingga tidak memberatkan pelanggan.

Suatu pelayanan akan berkualitas apabila dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan dan memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak.

H. Sanksi Pajak

Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dengan nama sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak bisa dikenakan salah satu diantara keduanya atau dikenakan kedua-duanya.

1. Sanksi administrasi (Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007)

Sanksi administrasi dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian kepada Negara, dapat berupa bunga, denda atau kenaikan.

a. Sanksi berupa bunga

Diberikan sanksi berupa bunga sebesar 2 (dua) persen sebulan untuk pelanggaran yang dilakukan wajib pajak berikut ini

Tabel II.1
Sanksi Administrasi (Bunga)

Pelanggaran	Pasal	Cara Membayar/Menagih
1. Pembetulan sendiri (SPT masa dan SPT tahunan) tetapi belum diperiksa	8 (2)	SSP
2. Dari penelitian rutin		SSP/STP
a. PPh psl 25 tidak atau kurang bayar	14 (1)	SSP/STP
b. PPh psl 21,23,25 dan 26 serta PPn terlambat dibayar	19	
c. SKPKB, STP, SKPLB tidak/kurang atau terlambat dibayar	19	SSP/STP
d. SPT salah tulis	14	
3. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar (maks 24 bln)	13	SSP/SKP
	(1d)	SSP/STP
4. Pajak diangsur/ditunda, SKP, STP	19(2)	SSP/STP
5. SPT Tahunan (PPh) ditunda, pajak kurang bayar	19(3)	
6. Pengukuhan sebagai PKP	13(1e)	SSP/SKP

Sumber : Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007

b. Sanksi berupa denda administrasi

Tabel II.2
Sanksi administrasi (denda)

Pelanggaran	Pasal	Cara Membayar/Menagih
1. Tidak/terlambat menyampaikan SPT:	7	
a. SPT Masa PPN		
b. SPT Masa lainnya		
c. SPT Tahunan Badan		

d. SPT Tahunan OP		
2. Pembentukan Sendiri SPT Tahunan (telah diperiksa tapi belum dilakukan tindakan penyidikan)	8 ayat 3	
3. Khusus untuk PPN		
a. Tidak membuat atau mengisi faktur pajak	14 ayat 1f	
b. Melanggar larangan membuat faktur pajak	14 ayat 1e	

Sumber : Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007

c. Sanksi berupa kenaikan 50%

Tabel II.3
Sanksi Administrasi (Kenaikan 50%)

Pelanggaran	Pasal	Penagihan
Tidak menyampaikan SPT Tahunan pada waktunya	13 1(b)	SKPKB
Tidak menyelenggarakan pembukuan	28	SKPKB
Tidak memperlihatkan dokumen,dst	29	SKPKB

Sumber : Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007

d. Sanksi berupa kenaikan 100%

Tabel II.4
Sanksi Administrasi (Kenaikan 100%)

Pelanggaran	Pasal	Penagihan
Tidak menyampaikan SPT masa potput dan PPN pada waktunya	13 1(b,c)	SKPKB
Tidak menyelenggarakan pembukuan PPh potput dan PPN	28	SKPKB
Tidak memperlihatkan dokumen, PPh potput dan PPN	29	SKPKB
Diterbitkan SKPKBT karena ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap	15	SKPKBT

Dari hasil pemeriksaan PPN dan PPnBM tidak seharusnya dikompensasi atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%	13 ayat 1c	SKPKB
---	---------------	-------

Sumber : Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007

2. Sanksi Tindak Pidana

Undang-Undang pajak membagi sanksi pidana menjadi tiga yaitu :

- a. Pidana denda
- b. Pidana kurungan
- c. Pidana penjara

Jika dikelompokkan kepada pelaku pidana pajak, maka sanksi pidana diberikan kepada :

- a. Wajib pajak
- b. Pejabat pajak
- c. Pihak ketiga

I. Kepatuhan Perpajakan

Menurut Ismawan,2001:82 (dalam Ana Aime,2012:6) mengemukakan prinsip administrasi pajak yang diterima secara luas menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah kepatuhan sukarela. Kepatuhan sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment* dimana wajib pajak bertanggung jawab

menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut.

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada azas-azas yang dikenal dengan *The Four Maxims* yaitu (Adam Smith, 2002:30) :

1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.

2. *Certainty*

Menjamin kepastian setiap subjek pajak dari keraguan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, karena segala sesuatunya telah jelas adanya. Implikasi praktis dalam pemungutan pajak adalah terciptanya peraturan pajak yang menjamin kepastian hukum bagi pembayar pajak. Perpajakan harus menunjukkan dengan jelas hak dan kewajiban pajak.

3. *Convenience of payment*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak sebagai contoh pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as You Earn*.

4. *Efficiency*

Menjamin bahwa pengorbanan (biaya) yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Implikasi praktisnya adalah adanya daya guna dan hasil guna aparatur perpajakan dalam menghitung dan dari sektor perpajakan.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak, bukan fiskus selaku pemungut pajak.

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan yang dimaksud adalah kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dilakukan secara sukarela oleh wajib pajak itu sendiri bukan karena paksaan, dimana wajib

pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan (UU No.28 Tahun 2007).

Ada dua macam kepatuhan pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materil (Nurmantu, 2003 dalam Permata Bonasani, 2012).

- a. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Misalnya melaporkan SPT tepat waktu.
- b. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Misalnya mengisi SPT dengan jujur, lengkap dan benar, serta melaporkannya ke KPP tepat waktu.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.

- d. Dalam dua tahun pajak berakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud Pasal 28 UU KUP dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan koreksi pada pemeriksaan yang berakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

J. Pajak Dalam Islam

Pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Dalam islam juga dikenal istilah zakat. Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu.

Perpajakan yang ditetapkan pemerintah melalui undang-undangnya wajib ditunaikan oleh orang muslim, selama itu untuk kepentingan pembangunan diberbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan transportasi, pertahanan dan keamanan atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama. Alasan kaum muslimin menunaikan pajak yang ditetapkan negara, disamping penunaian kewajiban zakat, antara lain solidaritas dan tolong menolong.

Zakat dan pajak memperoleh porsi yang besar dalam sistem ekonomi islam sedemikian pentingnya. Sehingga zakat ditempatkan sebagai rukun islam ketiga sesudah shalat mendahului kewajiban puasa dan haji. Tujuan pajak itu adalah untuk membiayai berbagai pos pengeluaran negara, yang memang diwajibkan atas mereka (kaum muslimin) pada saat kondisi baitul mal kosong atau tidak mencukupi. Jadi, ada tujuan yang mengikat dari pemungutan pajak itu, yaitu pengeluaran yang memang sudah menjadi kewajiban kaum muslim, dan adanya suatu kondisi kekosongan kas negara (Gusfahmi, 2007)

Adapun beberapa persamaan antara zakat dan pajak, kedua-duanya sama-sama dipungut dari harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum persamaan lainnya adalah zakat dan pajak digunakan untuk kepentingan sosial bukan untuk kepentingan pribadi. Zakat dan pajak merupakan sarana untuk mendistribusikan keadilan sosial kepada masyarakat dalam hal ekonomi kedua-duanya juga merupakan respon terhadap akumulasi kondisi sosial yang menuntut pembiayaan dari masyarakat (Nurudin, 2006: 15).

Dalam hukum Islam klasik dikenal tiga sistem pemungutan pajak yaitu:

1. *Jizya* atau pajak kepala yang dikenakan kepada kafir zimmi, yaitu non muslim yang hidup dinegara/pemerintah Islam dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan pemerintah Islam untuk melindungi jiwa, keselamatan, kemerdekaan dan hak-hak asasi mereka. Dalam menghadapi negara non Islam terdapat tiga pilihan yang ditawarkan Islam. (1) masuk Islam, (2) membayar jizya atau (3) diperangi. Bagi yang masuk Islam mereka aman, tidak diperangi dan tidak ada kewajiban membayar

jizya. Bagi yang tidak mau masuk Islam ada dua pilihan yaitu membayar jizyah atau diperangi.

2. *Kharaj*, yaitu pajak bumi. Ini berlaku bagi tanah yang diperoleh kaum muslimin lewat peperangan yang kemudian dikembalikan dan digarap oleh para pemiliknya. Sebagai imbalannya maka pemiliknya mengeluarkan pajak bumi kepada pemerintah Islam.
3. '*Usyur*, yaitu pajak perdagangan atau bea cukai (Pajak Impor dan Ekspor). Mengingat bahwa kebutuhan biaya pembangunan dalam arti luas sangat besar termasuk jalannya roda pemerintahan, maka dibutuhkan dana yang cukup besar yang tidak dapat dipotong oleh zakat semata, Islam membenarkan pemungutan pajak.

Sesama kaum muslimin dan sesama umat manusia dalam kebaikan dan takwa merupakan kewajiban yang harus terpenuhi. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam *ada kewajiban lain diluar zakat*".

Allah SAW berfirman dalam surat Al-Baqarah:195

المُحْسِنِينَ يُجِبْ أَلِهَاءُ أَحْسِنُوا إِلَهُكُمْ لِيَأْيِدِكُمُ الْفُقَرَاءُ اللَّهُ سَبِيلُ فِي

Artinya:

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Qs. Al-baqarah:195)

Atas dasar alasan diatas, maka sah-sah saja adanya dua kewajiban bagi kaum muslimin (terutama kaum muslimin diIndonesia), yaitu kewajiban menunaikan zakat dan pajak sekaligus.

K. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiono,2009:10). Hipotesis menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan proporsi yang dapat diuji secara empiris.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Bendaharawan Pemerintah

Pengetahuan sering dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pendidikan, media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat luas dan keterpaparan informasi. Sedangkan menurut Bowman dan Bardley,1997:93(dalam Permata Bonasani,2011:21) pengetahuan itu terbagi atas tiga bidang yaitu pengetahuan bidang umum, pengetahuan keahlian khusus dan pengetahuan dunia.

Wajib pajak memiliki pengetahuan dalam melaksanakan kewajibannya karena apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang kurang maka wajib pajak akan ragu dalam mengisi SPT dan pembayaran pajak terutanganya. Menurut penelitian (Permata Bonasani,2011:56) yang penelitiannya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah di Provinsi Riau. Menyatakan pengetahuan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak bendaharawan pemerintah diProvinsi Riau. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa T-statistic lebih besar dari T-tabelnya.

X1 : Diduga bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan

b. Pelayanan perpajakan dan kepatuhan bendaharawan pemerintahan

Pelayanan diukur dari standar kualitas pelayanan tersebut (Boediono, 2004:76). Hakikat dari pelayanan mutu yang berkualitas adalah dengan meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dibidang pelayanan umum. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien. Serta menciptakan kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan sehingga meningkatkan kesejahteraan msyarakat umum.

Salah satu langkah yang harus ditempuh adalah memberikan kualitas layanan yang mampu memberikan pengetahuan disiplin pajak (*tax consciousness*) kepada wajib pajak, sehingga dengan langkah tersebut diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya dalam pembayarann pajak akan terbentuk serta langkah permulaan untuk menuju kearah pelaksanaan *self assessment* yang murni dapat tercapai.

Penelitian (Yulia,2008:60) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Tampan Pekanbaru menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi dengan kualitas pelayanan. Sedangkan hasil penelitian Permata

Bonasani di bendahara pemerintah Provinsi Riau menunjukkan bahwa pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Jatmiko,2006(dalam Bonasani,2011:58) yang meneliti tentang pengaruh sikap Wajib Pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Ini menunjukkan adanya pengaruh positif antara pelayanan perpajakan terhadap kesediaan wajib pajak membayar pajak. Semakin baik tingkat pelayanan perpajakan maka semakin tinggi kesediaan wajib pajak orang pribadi membayar pajak.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis kedua yang diajukan sebagai berikut :

X2 : Diduga bahwa pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan

c. Sanksi pajak dan kepatuhan bendaharawan pemerintah

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2003:39).Pemberian sanksi terhadap wajib pajak dianggap mampu meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Semakin tinggi sanksi yang dikenakan semakin rendah arah koreksi penghasilan netto dari penghasilan netto menurut SPT ataupun sebaliknya. Artinya semakin tinggi sanksi yang dikenakan, tingkat

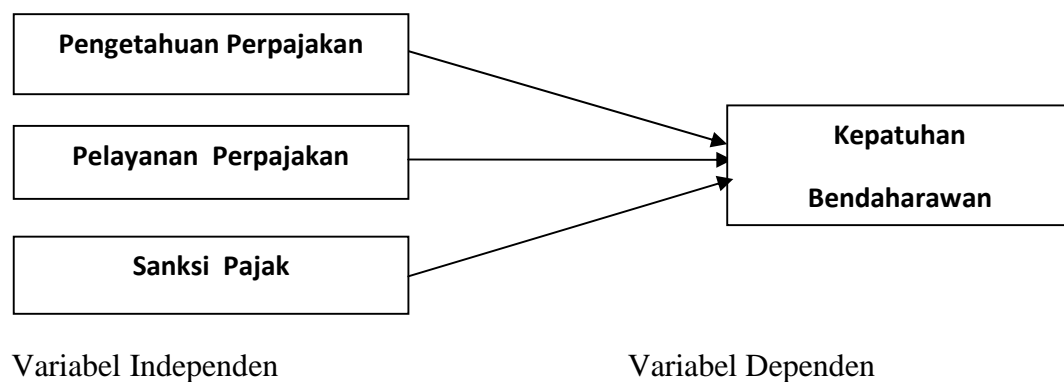
kepatuhan wajib pajakpun akan semakin tinggi. Ini sejalan dengan teori ketidakpatuhan, dimana wajib pajak akan cenderung patuh apabila *utility* kepatuhan lebih besar daripada *utility* ketidakpatuhan. Pemikiran ini didukung hasil penelitian (Permata Bonasani,2011:59). Hasil penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa sanksi pajak yang tegas berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Berdasarkan uraian diatas dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut :

X3 : Diduga bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan

L. Model Penelitian

Berdasarkan pembahasan dan hipotesis penelitian yang diajukan maka berikut tampilan model penelitian.

Gambar 2.1 Model Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiono,2009:14). Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi atau yang mewakili. Populasi pada penelitian ini adalah semua bendaharawan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, baik bendaharawan penerimaan maupun bendaharawan pengeluaran. Sampel dalam penelitian ini adalah Bendaharawan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampling yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel atau penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan Objek dalam penelitian ini adalah 30 bendaharawan instansi pemerintah dibidang perpajakan.

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penulisan ini adalah :

1. Dinas Kesehatan
2. Dinas Kependudukan

3. Dinas Pendapatan Daerah
4. Dinas Kehutanan
5. Dinas Pendidikan
6. Dinas Pertanian dan Peternakan
7. Kantor Perpustakaan dan Kearsipan
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9. Badan Kepegawaian
10. Badan Ketahanan Pangan
11. Komisi Pemilihan Umum
12. Badan Penanaman Modal
13. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
14. Kantor Pelayanan Terpadu
15. Dinas Sosial
16. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
17. Dinas Perhubungan
18. Sekretariat Daerah
19. Inspektorat

20. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

21. Dinas Bina Marga dan Pengairan

22. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

23. RSUD Sutomo

24. Dinas Perikanan dan Kelautan

25. Badan Pemberdayaan Masyarakat

26. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

27. Dinas Kebersihan dan Pertamanan

28. Dinas Perkebunan

29. RSUD Dr.RM.A.Pratomo

30. Badan Pertanahan

31. Sekretaris DRPD

32. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

33. Dinas Koperasi dan UKM

34. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh

secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak bendaharawan yang menjadi sampel penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data dan Pengukuran variabel

Data diperoleh dengan mengirimkan kuisisioner langsung kepada responden yaitu semua bendahara pengeluaran pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Jumlah sampel dari penelitian ini adalah 30 bendaharawan pengeluaran pemerintah.

Variabel yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini adalah tiga variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, pelayanan perpajakan dan sanksi pajak serta satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah. Pernyataan dalam kuisisioner untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert yaitu suatu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Metode ini adalah metode penskalaan sikap dengan menggunakan distribusi respon sebagai dasar penentuan skala. Untuk melakukan penskalaan, responden diberi jumlah daftar pertanyaan yang harus dijawab dengan pernyataan kesetujuan dan ketidaksetujuan. Pilihan jawaban pertanyaan digolongkan menjadi lima kategori yakni : “Sangat Setuju”(SS), ”Setuju”(S), “Ragu-Ragu” (R), “Tidak Setuju” (TS), “Sangat Tidak Setuju” (STS). Cara penentuan ini berlaku untuk semua variabel. Pada item-item yang digunakan maka pilihan jawaban :

1. Sangat Setuju (SS) mendapat skor 5
2. Setuju (S) mendapat skor 4
3. Ragu-Ragu (RR) mendapat skor 3
4. Tidak Setuju (TS) mendapat skor 2
5. Sangat Tidak Setuju (STS) mendapat skor 1

E. Rancangan Kuisisioner

Rancangan kuesioner ini dibagi atas dua bagian yaitu bagian pendahuluan dan bagian isi. Bagian pendahuluan berisikan data profil responden sebagai pendukung dalam analisa statistik. Sedangkan Bagian Isi terdiri dari pernyataan mengenai variabel-variabel sesuai dengan pengaruh tiga variabel independen terhadap variabel dependen yang akan diukur yaitu :

a. Pengetahuan Perpajakan

Kepatuhan Wajib Pajak adalah dimana wajib pajak mematuhi semua aturan perpajakan baik itu aturan formal maupun materil yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tata cara perpajakan. Untuk mengetahui tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak maka dapat diukur melalui 5 pertanyaan yang ada pada kuesioner yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak. Konstruk ini diukur menggunakan skala *likert* lima poin dengan Sangat Tidak Setuju (poin 1) hingga Sangat Setuju (poin 5).

b. Pelayanan Aparat Pajak

Untuk tingkat pelayanan aparat pajak diukur dengan menggunakan instrumen yang diadopsi dari penelitian Supadmi,2007(dalam Permata Bonasani,2011:33) yaitu *tangibles* (bukti langsung), *reability* (keandalan), *responsiveness* (daya tanggap), *assurance* (jaminan), dan *emphaty* (empati). Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen pertanyaan berskala likert yaitu dari sangat tidak setuju (poin1) hingga sangat setuju (poin 5).

c. Sanksi pajak

Sanksi pajak merupakan sanksi yang ditetapkan oleh aparat perpajakan dan disetujui oleh masyarakat dan diharapkan dapat ditaati dan dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Variabel ini diukur dengan instrumen yang diadopsi dari Tarjo dan Indra,2005(dalam Permata Bonasani,2011:36) yaitu pemahaman wajib pajak terhadap sanksi yang berlaku. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert dari yang sangat rendah yaitu sangat tidak setuju (poin 1) hingga sangat setuju (poin 5).

d. Kepatuhan Bendaharawan Pemerintah

Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen yang diadopsi dari penelitian Yulia,2008(dalam Permata Bonasani,2011:42) yaitu (1) benar dalam perhitungan pajak terutang, (2) benar dalam pengisian formulir SPT, (3) tepat waktu, (4) melakukan kewajibannya dengan sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Instrument ini digunakan untuk mewakili Keputusan Menteri Keuangan (235/KMK.03/2003) Pasal 1 yaitu wajib pajak

dikatakan patuh bila : (1) benar dalam perhitungan pajak terutang, (2) benar dalam pengisian formulir SPT, (3) tepat waktu, (4) melakukan kewajibannya dengan sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan. Variabel ini diukur dengan menggunakan instrument pertanyaan berskala likert dari sangat tidak setuju (poin 1) hingga sangat setuju (poin 5).

F. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen yang digunakan untuk memprediksi atau meramalkan suatu nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen (Duwi Priyanto,2011:80). Dengan persamaan yaitu :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 +$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Konstanta

b_1, b_2 dan b_3 : Koefisien Regresi

X_1 : Pengetahuan Perpajakan

X_2 : Pelayanan Perpajakan

X_3 : Sanksi Perpajakan

G. Uji Kualitas Data

Penelitian ini menggunakan variabel-variabel latent atau un-observed atau variabel konstruk. Dimana variabel ini tidak dapat diukur secara langsung, tetapi dibentuk melalui dimensi-dimensi yang diamati atau indikator-indikator yang diamati. Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam pengumpulan datanya sehingga perlu dilakukan pengujian yaitu dengan uji Reabilitas dan uji validitas.

a. Uji reabilitas

Reabilitas adalah suatu alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang variabelnya merupakan variabel yang konstruk atau variabel latent. Suatu variabel dikatakan reliabel adalah jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabel dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *repeated measure* atau pengukuran ulang. Misalnya seseorang akan diberikan pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda dan apakah ia tetap konsisten dengan jawabannya.

b. Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa cermat suatu item dalam mengukur objeknya (Duwi Priyanto, 2011:117).

Teknik uji validitas item dengan korelasi Pearson dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor item dengan skor total item, kemudian pengujian signifikan dilakukan dengan kriteria r tabel pada tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika nilai positif dan r hitung \geq r tabel, maka item dapat dinyatakan valid dan begitu pula sebaliknya.

H. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan keadaan dimana ada hubungan linier secara sempurna atau mendekati sempurna antara variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah yang terbebas dari masalah multikolinearitas. Konsekuensinya adanya multikolinearitas adalah koefisien korelasi tidak tertentu dan kesalahan menjadi sangat besar atau tidak terhingga.

Variabel yang menyebabkan multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance yang lebih kecil dari 0,1 atau nilai VIF yang lebih besar dari nilai 10 (Hair et al.1992 dalam Duwi Priyanto,2011:93). Dari output regresi didapatkan nilai tolerance lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 sehingga tidak terjadi multikolinearitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan didalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengambilan keputusannya yaitu jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji autokorelasi

Autokorelasi merupakan hubungan yang terjadi antara residual dari pengamatan satu dengan pengamatan yang lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, maka nilai DW akan dibandingkan dengan DW tabel. Jika $DW < dL$ atau $DW > 4-dL$ berarti tidak ada autokorelasi. Jika DW terletak antara dU dan $4-dU$ berarti tidak ada autokorelasi dan jika Dw terletak antara dL dan dU atau diantara $4-dU$ dan $4-dL$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

I. Pengujian hipotesis

Untuk melihat pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan uji hipotesis. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan perpajakan bendaharawan, pelayanan perpajakan dan sanksi pajak.

a. Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis yang diajukan, dapat dilakukan dengan membandingkan t-statistik dengan t-hitung dimana apabila nilai $t\text{-statistik} < t\text{-hitung}$ maka hipotesis diterima namun apabila $t\text{-statistik} > t\text{-hitung}$ maka hipotesis ditolak. Atau hipotesis

juga dapat diuji dengan membandingkan $p\text{-value}$ dengan α (), dimana nilai α () dalam penelitian ini adalah 0,05. Jika $p\text{-value} < \alpha$ () maka hipotesis diterima, namun apabila $p\text{-value} > \alpha$ () hipotesis ditolak (Ghozali, 2005).

b. Uji F (secara bersama-sama)

Uji F adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh dari semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variable dependen.

Langkah-langkah pengujiannya adalah :

$H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = 0$ artinya bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen.

$H_0 : b_1 \neq b_2 \neq b_3 > 0$ artinya bahwa variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen.

H_0 diterima bila $F_{hitung} \leq F_{tabel} (\alpha : k ; n - k - 1)$

H_0 diterima bila $F_{hitung} > F_{tabel} (\alpha : k ; n - k - 1)$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kuesioner dan Demografi

Kuisisioner yang dikirim keseluruhannya sebanyak 34 kuisisioner. Kuisisioner ini dikirim secara langsung kepada setiap respondennya. Total kuisisioner yang diterima peneliti sebanyak 34 kuisisioner dengan *respon rate* sebesar 100%. Kuisisioner yang hanya dapat dianalisa hanya sebanyak 32 kuisisioner karena ada 2 kuisisioner yang beberapa item pertanyaannya yang tidak diisi secara lengkap sehingga tidak bisa dilakukan analisa selanjutnya.

Tabel IV.1
Sampel dan Tingkat Pengembalian
Keterangan

	Total Kuisisioner
Total kuisisioner yang dikirim	34
Total kuisisioner yang kembali	34
Persentase pengembalian kuisisioner	100%
Kuisisioner yang gugur	2
Kuisisioner yang valid	32
Persentase respon akhir	94,17%

Sumber : Data Olahan

Tabel IV.2.
Demografi Responden
Frekuensi

Keterangan		Persentase
Jenis Kelamin		
a. Pria	15	48,88%
b. Wanita	17	53,12%
Umur		
a. 24 – 32 tahun	17	53,13%
b. 33 – 41 tahun	13	40,62%
c. 42 – 50 tahun	2	6,25%
Pendidikan		
a. SD	0	0%
b. SMP	0	0%
c. SMA	23	71,88%
d. D1-D2	2	6,25%
e. S1-S2	7	21,87%

Sumber : Data Olahan

B. Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, nilai maksimum dan minimum

(Ghozali, 2005). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan terhadap 32 wajib pajak bendaharawan pemerintah di Kabupaten Rokan Hilir.

Statistik deskriptif penelitian ini dapat dilihat pada tabel IV.3 berikut ini:

Tabel IV.3
Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Std. Deviation	N
Kepatuhan Perpajakan	17.84	3.985	32
Pengetahuan Perpajakan	18.38	4.798	32
Pelayanan Perpajakan	18.47	3.902	32
Sanksi Pajak	16.91	3.930	32

Dari hasil statistik deskriptif dapat dilihat bahwa kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah merupakan Variabel dependen mempunyai rata-rata jawaban responden adalah 17,84 diperoleh standar deviasi 3,985. Pengetahuan perpajak dengan nilai rata-rata jawaban responden 18,38 dan diperoleh standar deviasi 4,798. Pelayanan perpajakan mempunyai nilai rata-rata 18,47 dan diperoleh standar deviasi 3,902. Sanksi pajak mempunyai nilai rata-rata 16,91 dan

diperoleh standar deviasi 3,930. Dilihat dari standar deviasinya, variabel pengetahuan perpajakan mempunyai standar deviasi tertinggi dibanding variabel lainnya.

C. Uji Kualitas Data

Setelah data dikumpulkan dan diseleksi kelengkapannya untuk dianalisis maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap validitas dan reliabilitas data. Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan secara keseluruhan terhadap seluruh item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel penelitian.

a. Uji Validitas Data

Berdasarkan uji validitas butir-butir pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini dengan menggunakan Korelasi Pearson melalui aplikasi SPSS, setiap butir pertanyaan berkorelasi Positif terhadap skor total dengan signifikansi pada level 0,05. Untuk mengetahui validitas setiap butir pertanyaan pada kuesioner, maka r_{hitung} dibandingkan dengan range yang dipakai untuk mengukur validitas yaitu berada sekitar angka -1, 0, dan +1. Jika r_{hitung} semakin mendekati angka 1, maka item pertanyaan tersebut tidak valid, dan sebaliknya jika r_{hitung} mendekati angka 0 (makin menjauhi angka 1) maka item pertanyaan tersebut tidak valid digunakan dalam sebuah penelitian. Hasil dari validitas setiap butir pertanyaan yaitu sebagai berikut :

1. Pengetahuan Perpajakan (X1)

Instrumen pengetahuan perpajakan terdiri dari 5 pertanyaan. Dari hasil perhitungan korelasi setiap butir pertanyaan terhadap totalnya, diperoleh hasil berkisar antara 0,486-0,810 (range terendah sampai tertinggi). Dapat disimpulkan bahwa setiap butir pertanyaan pada instrumen kepatuhan wajib pajak adalah valid dan setiap butir pertanyaan memiliki korelasi yang positif dengan skor total dengan tingkat signifikan 0,05. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel IV.4. berikut:

Tabel IV.4.
Validitas Instrumen Pengetahuan Perpajak (X1)

Item Pertanyaan	Korelasi Person	Keterangan
X1.1	0,846	Valid
X1.2	0,767	Valid
X1.3	0,911	Valid
X1.4	0,884	Valid
X1.5	0,883	Valid

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel IV.5. maka pada pertanyaan variabel X1.1 yaitu sumber penerimaan negara terbesar adalah pajak. Persentase jawaban responden pada jawaban sangat setuju sebesar 40,6%, setuju sebesar 37,5%, ragu-ragu sebesar 6,2%, tidak setuju sebesar 15,6% dan sangat tidak setuju sebesar 0%. Pertanyaan variabel X1.2 yaitu Penerimaan pajak adalah alat pembayaran utang luar negeri. Persentase jawaban responden pada jawaban sangat setuju sebesar 25%, setuju sebesar 37,5%, ragu-ragu sebesar 37,5%, tidak setuju sebesar 0% dan sangat tidak

setuju sebesar 0%. Pertanyaan variabel X1.3 yaitu dengan adanya penerimaan pajak maka pelayanan aparat pajak bertambah baik dibanding lima tahun lalu. Persentase jawaban responden pada jawaban sangat setuju sebesar 25%, setuju sebesar 40,6%, ragu-ragu sebesar 12,5%, tidak setuju sebesar 21,9% dan sangat tidak setuju sebesar 0%. Pertanyaan variabel X1.4 yaitu dengan adanya penerimaan pajak maka pembangunan sekolah bertambah baik dibanding lima tahun lalu. Persentase jawaban responden pada jawaban sangat setuju sebesar 21,9%, setuju sebesar 34,4%, ragu-ragu sebesar 21,9%, tidak setuju sebesar 21,9% dan sangat tidak setuju sebesar 0%. Pertanyaan variabel X1.5 yaitu dengan adanya penerimaan pajak maka pelayanan kesehatan dari pemerintah bertambah baik dibanding lima tahun lalu. Persentase jawaban responden pada jawaban sangat setuju sebesar 31,3%, setuju sebesar 37,5%, ragu-ragu sebesar 12,5%, tidak setuju sebesar 15,6% dan sangat tidak setuju sebesar 3,1%.

Tabel IV.5.
Persentase Jawaban Responden

No.	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1.	Sumber penerimaan negara terbesar adalah pajak	40,6%	37,5%	6,2%	15,6%	0%
2.	Penerimaan pajak adalah alat pembayaran utang luar negeri	25%	37,5%	37,5%	0%	0%
3.	Dengan adanya penerimaan pajak maka pelayanan aparat pajak bertambah baik dibanding lima tahun lalu	25%	40,6%	12,5%	21,9%	0%
4.	Dengan adanya penerimaan pajak maka pembangunan sekolah bertambah baik dibanding lima tahun lalu	21,9%	34,4%	21,9%	21,9%	0%

5.	Dengan adanya penerimaan pajak maka pelayanan kesehatan dari pemerintah bertambah baik dibanding lima tahun lalu	31,3%	37,5%	12,5%	15,6%	3,1%
----	--	-------	-------	-------	-------	------

Sumber : Data Olahan

2. Pelayanan Perpajakan (X2)

Pada instrumen pelayanan perpajakan terdiri atas 5 pertanyaan. Berdasarkan tabel IV.6. hasil perhitungan korelasi setiap butir pertanyaan terhadap totalnya, diperoleh hasil berkisar antara 0,796-0,849. Dapat disimpulkan bahwa setiap butir pertanyaan pada instrumen pengetahuan perpajakan adalah valid dan setiap butir pertanyaan memiliki korelasi positif dengan skor totalnya dengan tingkat signifikansi 0,05. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel IV.6. berikut:

Tabel IV.6.
Validitas Instrumen Pelayanan Perpajakan (X2)

Item Pertanyaan	Korelasi Pearson	Keterangan
X2.1	0,806	Valid
X2.2	0,833	Valid
X2.3	0,796	Valid
X2.4	0,828	Valid

X2.5	0,849	Valid
------	-------	-------

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel IV.7. maka pada pertanyaan variabel X2.1 yaitu dirjen pajak mampu memberikan pelayanan sesuai dengan janji yang ditawarkan. Persentase jawaban responden pada jawaban sangat setuju sebesar 18,8%, setuju sebesar 34,4%, ragu-ragu sebesar 28,1%, tidak setuju sebesar 18,8% dan sangat tidak setuju sebesar 0%. Pertanyaan variabel X2.2 yaitu petugas pajak tidak akan menerima suap yang akhirnya dapat merugikan bendaharawan. Persentase jawaban responden pada jawaban sangat setuju sebesar 21,9%, setuju sebesar 43,8%, ragu-ragu sebesar 31,2%, tidak setuju sebesar 3,1% dan sangat tidak setuju sebesar 0%. Pertanyaan variabel X2.3 yaitu Petugas pajak tidak akan menggunakan kewenangannya demi keuntungan pribadi. Persentase jawaban responden pada jawaban sangat setuju sebesar 31,2%, setuju sebesar 34,4%, ragu-ragu sebesar 28,1%, tidak setuju sebesar 6,2% dan sangat tidak setuju sebesar 0%. Pertanyaan variabel X2.4 yaitu Pelaporan pajak tidak berbelit-belit. Persentase jawaban responden pada jawaban sangat setuju sebesar 21,9%, setuju sebesar 40,6%, ragu-ragu sebesar 28,1%, tidak setuju sebesar 9,4% dan sangat tidak setuju sebesar 0%. Pertanyaan variabel X2.5 yaitu dirjen pajak selalu berusaha untuk memahami, memenuhi keinginan dan kebutuhan bendaharawan. Persentase jawaban responden pada jawaban sangat setuju sebesar 12,5%, setuju sebesar 40,6%, ragu-ragu sebesar 34,4%, tidak setuju sebesar 3,1% dan sangat tidak setuju sebesar 9,4%.

Tabel IV.7.

Persentase Jawaban Responden

No.	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1.	Dirjen pajak mampu memberikan pelayanan sesuai dengan janji yang ditawarkan	18,8%	34,4%	28,1%	18,8%	0%
2.	Petugas pajak tidak akan menerima suap yang akhirnya dapat merugikan bendaharawan	21,9%	43,8%	31,2%	3,1%	0%
3.	Petugas pajak tidak akan menggunakan kewenangannya demi keuntungan pribadi	31,2%	34,4%	28,1%	6,2%	0%
4.	Pelaporan pajak tidak berbelit-belit	21,9%	40,6%	28,1%	9,4%	0%
5.	Dirjen pajak selalu berusaha untuk memahami, memenuhi keinginan dan kebutuhan bendaharawan	12,5%	40,6%	34,4%	3,1%	9,4%

Sumber : Data Olahan

3. Sanksi Pajak (X3)

Pada instrumen sanksi pajak terdiri atas 5 pertanyaan. Berdasarkan tabel IV.8. Hasil perhitungan korelasi setiap butir pertanyaan terhadap totalnya, diperoleh hasil berkisar antara 0,494-0,790. Hasil perhitungan korelasi setiap butir pertanyaan pada instrumen sanksi pajak adalah valid dan setiap butir pertanyaan memiliki korelasi positif dengan skor totalnya dengan tingkat signifikansi 0,05. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel IV.8. sebagai berikut:

Tabel IV.8.
Validitas Instrumen Sanksi Pajak (X3)

Item Pertanyaan	Korelasi Pearson	Keterangan
X3.1	0,494	Valid
X3.2	0,763	Valid
X3.3	0,752	Valid
X3.4	0,790	Valid
X3.5	0,746	Valid

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel IV.9. maka pada pertanyaan variabel X3.1 yaitu saya sudah sepantasnya dikenakan sanksi pajak atas keterlambatan membayar pajak. Persentase jawaban responden pada jawaban sangat setuju sebesar 9,4%, setuju sebesar 28,1%, ragu-ragu sebesar 37,5%, tidak setuju sebesar 25% dan sangat tidak setuju sebesar 0%. Pertanyaan variabel X3.2 yaitu keterlambatan melaporkan SPT Masa PPN dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000. Persentase jawaban responden pada jawaban sangat setuju sebesar 18,8%, setuju sebesar 43,8%, ragu-ragu sebesar 18,8%, tidak setuju sebesar 15,6% dan sangat tidak setuju sebesar 3,1%. Pertanyaan variabel X3.3 yaitu keterlambatan melaporkan SPT Masa, selain SPT Masa PPN dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000. Persentase jawaban responden pada jawaban sangat setuju sebesar 18,8%, setuju sebesar 28,1%, ragu-ragu sebesar 21,9%, tidak setuju sebesar 31,2% dan sangat tidak setuju sebesar 0%. Pertanyaan variabel X3.4 yaitu apabila melakukan penyelewengan pajak yang merugikan negara, dikenakan sanksi pidana penjara. Persentase jawaban responden pada jawaban sangat setuju sebesar 15,6%, setuju sebesar 25%, ragu-

ragu sebesar 21,9%, tidak setuju sebesar 31,2% dan sangat tidak setuju sebesar 0%. Pertanyaan variabel X3.5 yaitu saya merasa tidak nyaman apabila dikenakan sanksi pajak. Persentase jawaban responden pada jawaban sangat setuju sebesar 28,8%, setuju sebesar 28,1%, ragu-ragu sebesar 12,5%, tidak setuju sebesar 31,2% dan sangat tidak setuju sebesar 0%.

Tabel IV.9.
Persentase Jawaban Responden

No.	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1.	Saya sudah sepantasnya dikenakan sanksi pajak atas keterlambatan membayar pajak	9,4%	28,1%	37,5%	25%	0%
2.	Keterlambatan melaporkan SPT Masa PPN dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000	18,8%	43,8%	18,8%	15,6%	3,1%
3.	Keterlambatan melaporkan SPT Masa, selain SPT Masa PPN dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000	18,8%	28,1%	21,9%	31,2%	0%
4.	Apabila melakukan penyelewengan pajak yang merugikan negara, dikenakan sanksi pidana penjara	15,6%	25%	28,1%	28,1%	3,1%
5.	Saya merasa tidak nyaman apabila dikenakan sanksi pajak	28,8%	28,1%	12,5%	31,2%	0%

Sumber : Data Olahan

4. Kepatuhan Perpajakan (Y)

Pada instrumen kepatuhan perpajakan terdiri atas 5 pertanyaan. Berdasarkan tabel IV.10. hasil perhitungan korelasi setiap butir pertanyaan terhadap totalnya, diperoleh hasil berkisar antara 0,655-0,824. Hasil perhitungan korelasi setiap butir pertanyaan mendekati angka +1, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap butir pertanyaan pada instrumen penyuluhan pajak membayar pajak adalah valid dan setiap butir pertanyaan memiliki korelasi positif dengan skor totalnya dengan tingkat signifikan 0,05. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel IV.10. sebagai berikut:

Tabel IV.10.
Validitas Instrumen Kepatuhan Perpajakan (Y)

Item Pertanyaan	Korelasi Pearson	Keterangan
Y.1	0,655	Valid
Y.2	0,785	Valid
Y.3	0,778	Valid
Y.4	0,824	Valid
Y.5	0,706	Valid

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel IV.11. maka pada pertanyaan variabel X4.1 yaitu dalam praktek sehari-hari, saya menyetorkan pajak yang telah dipotong pada saat kapan saya punya waktu luang. Persentase jawaban responden pada jawaban sangat setuju sebesar 18,8%, setuju sebesar 46,9%, ragu-ragu sebesar 25%, tidak setuju sebesar 6,2% dan sangat tidak setuju sebesar 3,1%. Pertanyaan variabel X4.2 yaitu saya sering tidak menyadari jika telah menggunakan tarif pajak yang sudah

tidak berlaku, namun yang penting bagi saya ada memotong dan kemudian menyetorkannya. Persentase jawaban responden pada jawaban sangat setuju sebesar 9,4%, setuju sebesar 21,9%, ragu-ragu sebesar 43,8%, tidak setuju sebesar 21,9% dan sangat tidak setuju sebesar 3,1%. Pertanyaan variabel X4.3 yaitu saya hampir selalu tidak melaporkan pajak ke Kantor Pajak karena menurut saya yang penting pajak tersebut disetorkan ke kas negara. Persentase jawaban responden pada jawaban sangat setuju sebesar 28,1%, setuju sebesar 18,8%, ragu-ragu sebesar 31,2%, tidak setuju sebesar 18,8% dan sangat tidak setuju sebesar 3,1%. Pertanyaan variabel X4.4 yaitu saya sering menunda pembayaran pajak untuk sementara waktu, tanpa pemberitahuan ke Kantor Pajak tetapi pajak yang telah dipotong tetap disetorkan ke Kas Negara. Persentase jawaban responden pada jawaban sangat setuju sebesar 37,5%, setuju sebesar 43,8%, ragu-ragu sebesar 12,5%, tidak setuju sebesar 6,2% dan sangat tidak setuju sebesar 0%. Pertanyaan variabel X4.5 yaitu saya sering menyetorkan pajak yang mungkin saja lebih besar dari yang seharusnya. Persentase jawaban responden pada jawaban sangat setuju sebesar 34,4%, setuju sebesar 12,5%, ragu-ragu sebesar 15,6%, tidak setuju sebesar 34,4% dan sangat tidak setuju sebesar 3,1%.

Tabel IV.11.
Persentase Jawaban Responden

No.	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1.	Dalam praktek sehari-hari, saya menyetorkan pajak yang telah dipotong pada saat kapan saya punya waktu luang	18,8%	46,9%	25%	6,2%	3,1%
2.	Saya sering tidak menyadari jika telah menggunakan tarif	9,4%	21,9%	43,8%	21,9%	3,1%

	pajak yang sudah tidak berlaku, namun yang penting bagi saya ada memotong dan kemudian menyetorkannya					
3.	Saya hampir selalu tidak melaporkan pajak ke Kantor Pajak karena menurut saya yang penting pajak tersebut disetorkan ke kas negara	28,1%	18,8%	31,2%	18,8%	3,1%
4.	Saya sering menunda pembayaran pajak untuk sementara waktu, tanpa pemberitahuan ke Kantor Pajak tetapi pajak yang telah dipotong tetap disetorkan ke Kas Negara	37,5%	43,8%	12,5%	6,2%	0%
5.	Saya sering menyetorkan pajak yang mungkin saja lebih besar dari yang seharusnya	34,4%	12,5%	15,6%	34,4%	3,1%

Sumber : Data Olahan

Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa item-item pertanyaan dinyatakan valid kerana r hitung $>$ r tabel. Nilai r tabel dapat dilihat pada tabel r dengan df $N-2$ yaitu $32-2$ adalah $30 = 0,349$. Nilai r hitung dalam uji ini adalah *Pearson Correlation* antara item pertanyaan dengan total skor. Sedangkan diketahui nilai r hitung $>$ $0,349$, maka seluruh item-item variabel dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas Data

Pengujian reliabilitas penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach Alpha* dengan taksiran batasan minimal 0,6. Variabel penelitian akan dikatakan reliabel jika *Cronbach Alpha*-nya memiliki nilai lebih

besar dari 0,6. Sebaliknya jika koefisien alpha instrumen lebih rendah dari 0,6 maka instrumen tersebut dinyatakan tidak reliabel untuk digunakan dalam penelitian. Pada Tabel IV.11 berikut ini akan menerangkan hasil pengujian reliabilitas dari instrumen untuk setiap variabel penelitian.

Tabel IV.12.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien <i>Cronbach Alpha</i>	Jumlah Item Pertanyaan
Pengetahuan Perpajakan	0,908	5
Pelayanan Perpajakan	0,877	5
Sanksi Pajak	0,760	5
Kepatuhan Perpajakan	0,790	5

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan Tabel IV.11. dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas instrumen pengetahuan perpajakan, pelayanan perpajakan, sanksi pajak dan kepatuhan perpajakan menunjukkan *Cronbach Alpha* 0,908, 0,877 , 0,760, 0,790. Dari nilai kelima variabel diatas menunjukkan bahwa kofisien *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen penelitian ini adalah reliabel.

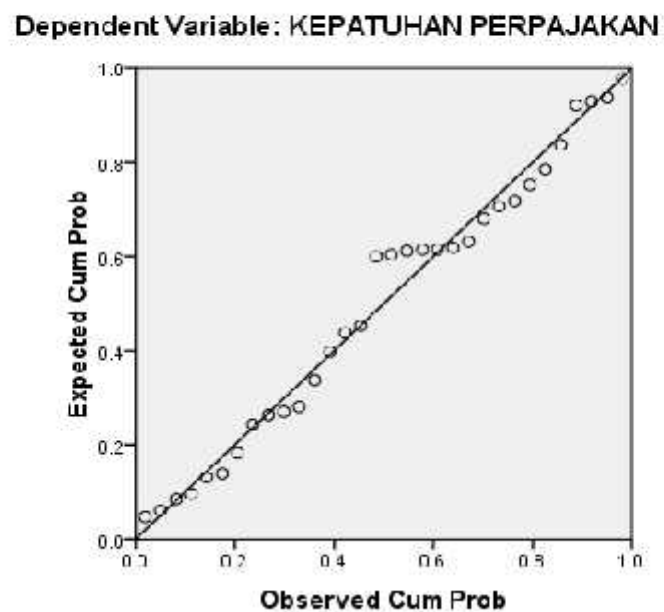
D. Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata jawaban responden berdistribusi normal. Hal tersebut dapat diketahui dengan

melihat penyebaran titik-titik pada sumbu diagonal grafik *P-P of Regression Standardized Residuals*. Jika titik-titik menyebar disekitar dan mengikuti garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Namun, jika titik-titik tersebar acak maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Grafik IV.1.
Normal Probability Standardizer Residual

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Dari grafik IV.1 dapat dilihat bahwa data tersebar disekitar garis diagonal (tidak terpencar jauh dari garis diagonal). Dapat disimpulkan bahwa persyaratan uji normalitas data dapat terpenuhi. Normalitas data bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik

adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik normal *probability plot of regression standardize residual*. Jika data menyebar disekitar garis diagram dan mengikuti garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas data. Dengan demikian pengujian statistik berupa uji F dan uji T dapat dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis.

E. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Multikolinearitas

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Santoso,2001(dalam Danil,2012:70) menyatakan bahwa regresi yang bebas multikolinearitas ditandai dengan nilai VIF yang besar. Untuk itu bila $VIF > 5$ maka dianggap terjadi multikolinearitas dengan variabel lainnya, sebaliknya jika diperoleh $VIF < 5$ maka dianggap tidak terjadi multikolinearitas antara satu variabel independen dengan variabel independen lainnya dalam persamaan regresi.

Tabel IV.13.
Nilai tolerance dan VIF

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,462	2,165	Tidak terjadi Multikolinearitas
Pelayanan Perpajakan	0,393	2,546	
Sanksi Pajak	0,371	2,696	

Sumber : Data Olahan

Dari tabel IV.13 dapat dilihat nilai tolerance dan nilai VIF untuk variabel independen berkisar dibawah angka 5, sehingga model tersebut tersebut bebas dari pengaruh multikolinearitas. Artinya hasil perhitungan nilai *variance inflation factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari angka 5. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu (error) pada priode t dengan kesalahan pengganggu pada priode sebelumnya. Autokorelasi pada penelitian ini dideteksi dengan Durbin Watson. Batas tidak terjadinya autokorelasi adalah angka Durbin-Watson jika DW terletak antara D_u dan $4-D_u$ (Duwi Priyanto,2011:94).

Tabel IV.14.
Statistik Durbin-Watson

Deskriptif	Nilai Durbin-Watson	Keterangan
$k = 3$ $N = 32$ $4-du = 2,3495$ $D_u = 1,6505$	1,691	Tidak terjadi Autokorelasi

Sumber : Data Olahan

Dalam penelitian ini keberadaan autokorelasi diuji dengan menggunakan *Durbin Watson Test* (Duwi Priyatno, 2012:84) yaitu:

- 1) Jika $DW < dL$ atau $DW > 4-dL$ berarti terdapat autokorelasi
- 2) Jika DW terletak antara Du dan $4-Du$ berarti tidak ada autokorelasi
- 3) Jika DW terletak antara dL dan dU atau diantara $4-dU$ dan $4-dL$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Hal tersebut telah membuktikan bahwa model analisis memenuhi syarat bebas autokorelasi atau tidak terdapat autokorelasi. Dari tabel diatas dapat dilihat statistic *Durbin-Watson* sebagai hasil output sebesar 1,691. Dimana diketahui $dU < DW < 4-dU$ yaitu $1,6505 < 1,691 < 2,3495$.

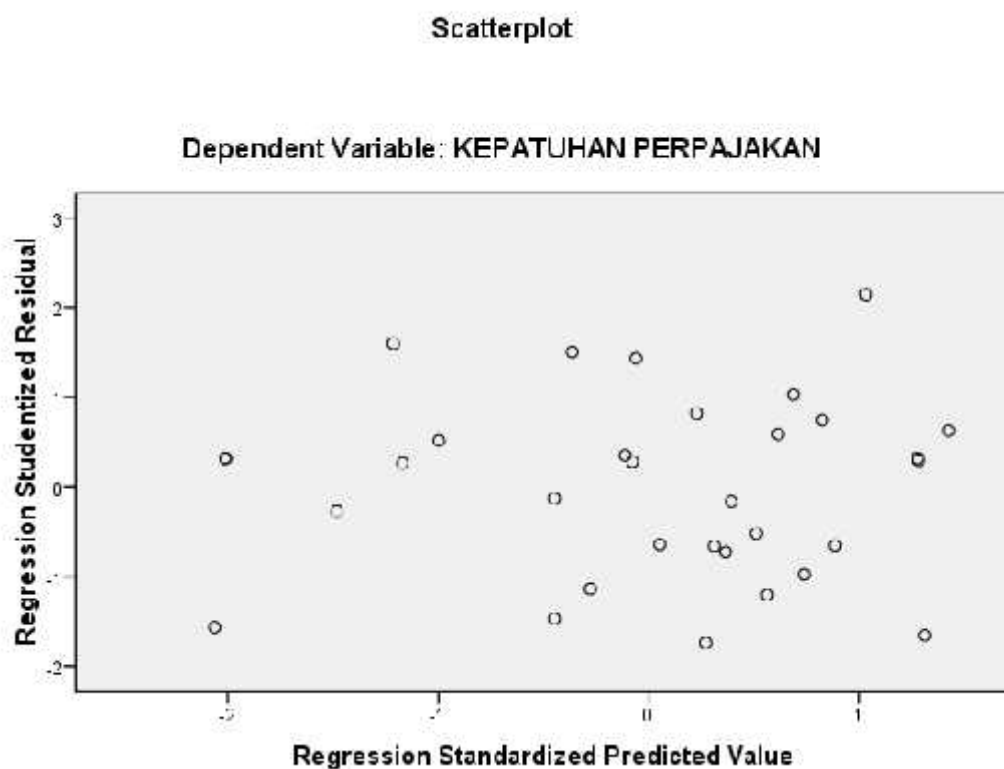
c. Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier terjadi ketidaksamaan varian dari residual pengamatan ke pengamatan yang lain. Pemeriksaan terhadap gejala heterokedastisitas adalah dengan melihat pola diagram pencar (*Scatter Plot*). Jika diagram pancar yang membentuk pola-pola tertentu yang teratur, maka regresi mengalami gangguan heterokedastisitas. Artinya jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. Namun jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas (Duwi Priyanto,2011:93).

Gambar IV.2. dibawah ini merupakan gambar hasil uji heterokedastisitas dimana diagram pencar yang tidak membentuk pola atau acak, maka regresi pada penelitian ini tidak mengalami gangguan heterokedastisitas.

Dari grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan variabel independen.

Gambar IV.2.
Scatter Plot



F. Analisis Regresi

Penelitian ini menggunakan metode *enter* dengan bantuan program SPSS (*Statistical Product Service Solution*) versi 19.00 dimana semua variabel

independen digunakan untuk menjelaskan variabel dependen. Dalam penelitian ini digunakan suatu model analisis regresi berganda, yaitu menggunakan variabel pengetahuan perpajakan, pelayanan perpajakan, sanksi pajak dan kepatuhan perpajakan sehingga didapat persamaan:

$$= + {}_1X_1 + {}_2X_2 + {}_3X_3 +$$

Keterangan :

= Kepatuhan Perpajakan

= Konstanta

= Koefesien regresi

X_1 = Pengetahuan Perpajakan

X_2 = Pelayanan Perpajakan

X_3 = Sanksi Pajak

= *error term*

Dari pengolahan data tersebut maka persamaan regresi berganda akan terlihat sebagai berikut :

$$= 0,360 + 0,252X_1 + 0,348X_2 + 0,380X_3 +$$

Keterangan :

Nilai konstanta (α) sebesar 0,360 adalah konstan yang artinya apabila variabel independen diasumsikan nol (0), maka kepatuhan perpajakan bernilai 0,360.

Nilai koefisien regresi (β_1) pengetahuan perpajakan sebesar 0,252. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan penilaian terhadap pengetahuan perpajakan sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan nilai kepatuhan perpajakan sebesar 0,252 dengan asumsi variabel lain tetap.

Nilai koefisien regresi (β_2) pelayanan perpajakan sebesar 0,348. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan penilaian terhadap pelayanan perpajakan sebesar satu satuan maka akan meningkatkan nilai kepatuhan perpajakan sebesar 0,348 dengan asumsi variabel lain tetap.

Nilai koefisien regresi (β_3) sanksi pajak sebesar 0,38. Artinya bahwa setiap peningkatan penilaian terhadap sanksi pajak sebesar satu satuan maka akan meningkatkan nilai kepatuhan perpajakan sebesar 0,380 dengan asumsi variabel lain tetap.

G. Uji Hipotesis dan Pembahasan

1. Uji F (secara bersama-sama)

Uji F adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh dari semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut :

Tabel IV.15
Uji F Variabel

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	412.579	3	137.526	48.352	.000 ^a
Residual	79.640	28	2.844		
Total	492.219	31			

a. Predictor: (Constant), PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PELAYANAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK

b. Dependent Variable: KEPATUHAN PERPAJAKAN

Menurut tabel diatas diketahui bahwa F hitung sebesar 48,352 dengan signifikan sebesar 0,000. Sedangkan F tabelnya dapat diperoleh sebagai berikut :

$$F \text{ tabel} = n - k - 1 ; k$$

$$F \text{ tabel} = 32 - 3 - 1 ; 3$$

$$F \text{ tabel} = 28 ; 3$$

$$F \text{ tabel} = 2,947$$

Dengan keterangan bahwa n adalah jumlah sampel, k adalah variabel bebas dan 1 adalah konstan. Maka dapat diketahui F hitung > F tabel yaitu 48,352 > 2,947 dengan signifikan 0,000 < 0,05. Artinya adalah bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

2. Uji Parsial (t-test)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara individu.

Tabel IV. 16
Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.360	1.511		.238	.813
PENGETAHUAN PERPAJAKAN	.252	.093	.304	2.718	.011
PELAYANAN PERPAJAKAN	.348	.124	.341	2.810	.009
SANKSI PAJAK	.380	.127	.374	2.999	.006

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

PERPAJAKAN

Diketahui bahwa nilai t tabel pada taraf signifikansi 5% (2-tailed) dengan persamaan sebagai berikut :

$$t_{\text{tabel}} = n - k - 1 : /2$$

$$t_{\text{tabel}} = 32 - 3 - 1 : 0,005/2$$

$$t_{\text{tabel}} = 28 : 0,0025$$

$$t_{\text{tabel}} = 2,048$$

keterangan n : jumlah

 k : jumlah variabel bebas

 1 : konstan

1. Pengetahuan Perpajakan (X_1)

Berdasarkan hasil perhitungan regresi yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak diperoleh $t_{\text{hitung}} 2,781 > t_{\text{tabel}} 2,048$ dengan taraf signifikan $0,011 < 0,05$ maka H_0 diterima H_0 ditolak. Yang menunjukkan adanya pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan. Penelitian diatas menunjukkan adanya pengaruh positif antara pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan dari wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah dalam membayar pajak.

Dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian ini mendukung hipotesis pertama bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan. Dalam penelitian (Bonasani,2011:57) memperoleh hasil yang sama dimana pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah dalam membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan wajib pajak, maka akan mempunyai tingkat kepatuhan yang tinggi dalam membayar pajak. Apabila wajib pajak menerima manfaat secara tidak langsung maka memperbesar kesediaan wajib pajak dalam membayar pajak (Nurmantu, 2003: 155).

2. Pelayanan Perpajakan (X_2)

Berdasarkan hasil perhitungan regresi yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel pelayanan perpajakan diperoleh $t_{hitung} 2,810 < t_{tabel} 2,048$ dengan taraf signifikan $0,009 < 0,05$ maka H_0 ditolak H_a diterima yang menunjukkan adanya pengaruh antara pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan.

Dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian penelitian ini tidak mendukung hipotesis kedua bahwa ada pengaruh signifikan antara pelayanan pajak terhadap kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian ini tidak didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Bonasani, 2011: 58) yang menyatakan bahwa pelayanan perpajakan tidak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak.

3. Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi (R^2) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa baik suatu model yang ditetapkan dapat menjelaskan variabel dependen. Apabila R^2 bernilai 0, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh hubungan tersebut, jika R^2 bernilai 1 maka independen. Dengan demikian R^2 bernilai antara 0 dan 1.

Tabel IV.17.
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.916 ^a	.838	.821	1.687	1.691

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Perpajakan, Sanksi Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Perpajakan

Berdasarkan Tabel IV.15. diatas diperoleh nilai R sebesar 0,916 dan *R Square* (R^2) sebesar 0,821 atau 82%. Koefisien determinasi atau *R Square* (R^2) sebesar 0,821 memberi pengertian bahwa 84% kepatuhan wajib pajak membayar pajak dipengaruhi oleh pengetahuan pajak, pelayanan perpajakan dan sanksi pajak, sedangkan 18% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Dari persentase tersebut dapat dikatakan bahwa masih terdapat faktor individual lain sebesar 18% yang dapat dijelaskan oleh variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bendaharawan dalam membayar pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sebagaimana telah diuraikan pada bab I bahwa penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintahdi Kabupaten Rokan Hilir dalam membayar pajak.

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis pertama yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah dalam membayar pajak.

2. Kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis kelima yaitu sanksi pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesediaan wajib pajak orang pribadi membayar pajak.
3. Kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis kedua yaitu pelayanan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah dalam membayar pajak.
4. Hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,838 memberi pengertian bahwa 84% variabel kepatuhan wajib pajak membayar pajak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, pelayanan perpajakan dan sanksi pajak. Meskipun penelitian ini hanya menguji secara parsial, tetapi jumlah koefisien determinasi sebesar 84% memberi gambaran bahwa masih ada 16% variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah dalam membayar pajak.

B. Saran

Adapun saran-saran yang diberikan oleh peneliti bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu bagi penelitian selanjutnya ketika menggunakan objek penelitian wajib pajak bendaharawan pemerintah, akan lebih baik lagi jika memperluas sampel penelitian dan menambah variabel-variabel baru yang belum diteliti sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin. 2005. *Sikap manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bonasani, Permatasari. 2011. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Perpajakan dan Sanksi Aparat Pajak Terhadap Wajib Pajak Bendaharawan Pemerintah*. Pekanbaru : UNRI
- Danil. 2012. *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Teknis Perpajakan Wajib Pajak dan Penyuluhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak*. Pekanbaru : Universitas Riau.
- Fidel. 2010. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Jakarta : PT. Raja Rafindo Persada
- Fitrios, Ruhul dan Arridho Abduh. 2012. *Modul Pelatihan Brevet Pajak A&B*.
- Fitrios, Ruhul. 2008. *Pajak Penghasilan Teori dan Praktek Terkini*. Pekanbaru : UNRI Press
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ilyas, Wiryawan B dan Richard Burton. 2007. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 Tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharawan dan Kas Negar Untuk Memungut, Menyeter dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemugutan, Penyeteran dan Pelaporannya
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi offset
- Marsyahrul, Tony. 2005. *Pajak Penghasilan Potongan dan Pungutan*. Jakarta : PT.Grasindo
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Nurudin. 2006. *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Priyanto, Duwi. *Belajar Cepat Olah Data Statistik dengan SPSS*. Yogyakarta : CV. ANDI OFFSET
- Resmi, Siti. 2007. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat

Setiawan, Agus dan Hardi.2006. *Perpajakan Bendaharawan Pemerintah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Theresia, Natalia. 2008. *Faktor – faktor yang mempengaruhi kesediaan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Sriwedari, Surakarta membayar pajak*. Skripsi Akuntansi Universitas Kristen Petra.

Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007

Undang-undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000

www.depkeu.go.id

Lampiran 2 : Hasil Pengolahan Data

Frequency Table

x1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	5	15.6	15.6	15.6
	Ragu-ragu	2	6.2	6.2	21.9
	Setuju	12	37.5	37.5	59.4
	Sangat Setuju	13	40.6	40.6	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

x1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	12	37.5	37.5	37.5
	Setuju	12	37.5	37.5	75.0
	Sangat Setuju	8	25.0	25.0	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

x1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	7	21.9	21.9	21.9
	Ragu-ragu	4	12.5	12.5	34.4
	Setuju	13	40.6	40.6	75.0
	Sangat Setuju	8	25.0	25.0	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

x1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	7	21.9	21.9	21.9
	Ragu-ragu	8	25.0	25.0	11146.9
	Setuju	8	25.0	25.0	71.9
	Sangat Setuju	9	28.1	28.1	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

x1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	7	21.9	21.9	21.9
	Ragu-ragu	7	21.9	21.9	43.8
	Setuju	11	34.4	34.4	78.1
	Sangat Setuju	7	21.9	21.9	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

x2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	6	18.8	18.8	18.8
	Ragu-ragu	9	28.1	28.1	46.9
	Setuju	11	34.4	34.4	81.2
	Sangat Setuju	6	18.8	18.8	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

x2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	3.1	3.1	3.1
	Ragu-ragu	10	31.2	31.2	34.4
	Setuju	14	43.8	43.8	78.1
	Sangat Setuju	7	21.9	21.9	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

x2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	6.2	6.2	6.2
	Ragu-ragu	9	28.1	28.1	34.4
	Setuju	11	34.4	34.4	68.8
	Sangat Setuju	10	31.2	31.2	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

x2.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	3	9.4	9.4	9.4
	Ragu-ragu	9	28.1	28.1	37.5
	Setuju	13	40.6	40.6	78.1
	Sangat Setuju	7	21.9	21.9	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

x2.5

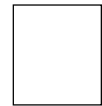
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	3	9.4	9.4	9.4
	Tidak Setuju	1	3.1	3.1	12.5
	Ragu-ragu	11	34.4	34.4	46.9
	Setuju	13	40.6	40.6	87.5
	Sangat Setuju	4	12.5	12.5	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

x3.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	8	25.0	25.0	25.0
	Ragu-ragu	12	37.5	37.5	62.5
	Setuju	9	28.1	28.1	90.6
	Sangat Setuju	3	9.4	9.4	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

x3.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	3.1	3.1	3.1
	Tidak Setuju	5	15.6	15.6	18.8
	Ragu-ragu	6	18.8	18.8	37.5



Setuju	14	43.8	43.8	81.2
Sangat Setuju	6	18.8	18.8	100.0
Total	32	100.0	100.0	

x3.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	10	31.2	31.2	31.2
Ragu-ragu	7	21.9	21.9	53.1
Setuju	9	28.1	28.1	81.2
Sangat Setuju	6	18.8	18.8	100.0
Total	32	100.0	100.0	

x3.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	1	3.1	3.1	3.1
Tidak Setuju	9	28.1	28.1	31.2
Ragu-ragu	9	28.1	28.1	59.4
Setuju	8	25.0	25.0	84.4

	Sangat Setuju	5	15.6	15.6	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

x3.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	10	31.2	31.2	31.2
	Ragu-ragu	4	12.5	12.5	43.8
	Setuju	9	28.1	28.1	71.9
	Sangat Setuju	9	28.1	28.1	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

y1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	3.1	3.1	3.1
	Tidak Setuju	2	6.2	6.2	9.4
	Ragu-ragu	8	25.0	25.0	34.4
	Setuju	15	46.9	46.9	81.2
	Sangat Setuju	6	18.8	18.8	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

y2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	3.1	3.1	3.1
	Tidak Setuju	7	21.9	21.9	25.0
	Ragu-ragu	14	43.8	43.8	68.8
	Setuju	7	21.9	21.9	90.6
	Sangat Setuju	3	9.4	9.4	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

y3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	3.1	3.1	3.1
	Tidak Setuju	6	18.8	18.8	21.9
	Ragu-ragu	10	31.2	31.2	53.1
	Setuju	6	18.8	18.8	71.9
	Sangat Setuju	9	28.1	28.1	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

y4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	6.2	6.2	6.2
	Ragu-ragu	4	12.5	12.5	18.8
	Setuju	14	43.8	43.8	62.5
	Sangat Setuju	12	37.5	37.5	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

y5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	3.1	3.1	3.1
	Tidak Setuju	11	34.4	34.4	37.5
	Ragu-ragu	5	15.6	15.6	53.1
	Setuju	4	12.5	12.5	65.6
	Sangat Setuju	11	34.4	34.4	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

Correlations Pengetahuan Perpajakan

Correlations

		x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	PENGETAHUAN PERPAJAKAN
x1.1	Pearson Correlation	1	.647**	.705**	.655**	.633**	.846**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	32	32	32	32	32	32
x1.2	Pearson Correlation	.647**	1	.642**	.469**	.482**	.767**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.007	.005	.000
	N	32	32	32	32	32	32
x1.3	Pearson Correlation	.705**	.642**	1	.782**	.787**	.911**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	32	32	32	32	32	32
x1.4	Pearson Correlation	.655**	.469**	.782**	1	.909**	.884**
	Sig. (2-tailed)	.000	.007	.000		.000	.000
	N	32	32	32	32	32	32
x1.5	Pearson Correlation	.633**	.482**	.787**	.909**	1	.883**
	Sig. (2-tailed)	.000	.005	.000	.000		.000
	N	32	32	32	32	32	32
PENGETAHUAN PERPAJAKAN	Pearson Correlation	.846**	.767**	.911**	.884**	.883**	1



Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
N	32	32	32	32	32	32

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations Pelayanan Perpajakan

Correlations

		x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	x2.5	PELAYANAN PERPAJAKAN
x2.1	Pearson Correlation	1	.498**	.568**	.564**	.637**	.806**
	Sig. (2-tailed)		.004	.001	.001	.000	.000
	N	32	32	32	32	32	32
x2.2	Pearson Correlation	.498**	1	.711**	.687**	.601**	.833**
	Sig. (2-tailed)	.004		.000	.000	.000	.000
	N	32	32	32	32	32	32
x2.3	Pearson Correlation	.568**	.711**	1	.503**	.527**	.796**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000		.003	.002	.000
	N	32	32	32	32	32	32
x2.4	Pearson Correlation	.564**	.687**	.503**	1	.671**	.828**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.003		.000	.000
	N	32	32	32	32	32	32
x2.5	Pearson Correlation	.637**	.601**	.527**	.671**	1	.849**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.002	.000		.000
	N	32	32	32	32	32	32
PELAYANAN PERPAJAKAN	Pearson Correlation	.806**	.833**	.796**	.828**	.849**	1

Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
N	32	32	32	32	32	32

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations Sanksi Pajak

Correlations

		x3.1	x3.2	x3.3	x3.4	x3.5	SANKSI PAJAK
x3.1	Pearson Correlation	1	.218	.231	.379 [*]	.064	.494 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		.230	.203	.033	.727	.004
	N	32	32	32	32	32	32
x3.2	Pearson Correlation	.218	1	.440 [*]	.502 ^{**}	.541 ^{**}	.763 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.230		.012	.003	.001	.000
	N	32	32	32	32	32	32
x3.3	Pearson Correlation	.231	.440 [*]	1	.473 ^{**}	.498 ^{**}	.752 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.203	.012		.006	.004	.000
	N	32	32	32	32	32	32
x3.4	Pearson Correlation	.379 [*]	.502 ^{**}	.473 ^{**}	1	.453 ^{**}	.790 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.033	.003	.006		.009	.000
	N	32	32	32	32	32	32
x3.5	Pearson Correlation	.064	.541 ^{**}	.498 ^{**}	.453 ^{**}	1	.746 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.727	.001	.004	.009		.000
	N	32	32	32	32	32	32
SANKSI PAJAK	Pearson Correlation	.494 ^{**}	.763 ^{**}	.752 ^{**}	.790 ^{**}	.746 ^{**}	1

Sig. (2-tailed)	.004	.000	.000	.000	.000	
N	32	32	32	32	32	32

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations Kepatuhan Perpajakan

Correlations

		y1	y2	y3	y4	y5	KEPATUHAN PERPAJAKAN
y1	Pearson Correlation	1	.453**	.353*	.585**	.238	.655**
	Sig. (2-tailed)		.009	.047	.000	.189	.000
	N	32	32	32	32	32	32
y2	Pearson Correlation	.453**	1	.638**	.551**	.373*	.785**
	Sig. (2-tailed)	.009		.000	.001	.036	.000
	N	32	32	32	32	32	32
y3	Pearson Correlation	.353*	.638**	1	.560**	.367*	.778**
	Sig. (2-tailed)	.047	.000		.001	.039	.000
	N	32	32	32	32	32	32
y4	Pearson Correlation	.585**	.551**	.560**	1	.472**	.824**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.001		.006	.000
	N	32	32	32	32	32	32
y5	Pearson Correlation	.238	.373*	.367*	.472**	1	.706**

	Sig. (2-tailed)	.189	.036	.039	.006		.000
	N	32	32	32	32	32	32
KEPATUHAN PERPAJAKAN	Pearson Correlation	.655**	.785**	.778**	.824**	.706**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	32	32	32	32	32	32

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Pengetahuan Perpajakan

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	32	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	32	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.908	5

Reliability Pelayanan Perpajakan

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	32	100.0
	Excluded ^a	0	.0

Total	32	100.0
-------	----	-------

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.877	5

Reliability Sanksi Pajak

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	32	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	32	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.760	5

Reliability Kepatuhan Perpajakan

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	32	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	32	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.790	5

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
KEPATUHAN PERPAJAKAN	17.84	3.985	32
PENGETAHUAN PERPAJAKAN	18.38	4.798	32
PELAYANAN PERPAJAKAN	18.47	3.902	32
SANKSI PAJAK	16.91	3.930	32

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN , PELAYANAN PERPAJAKAN ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: KEPATUHAN PERPAJAKAN

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.916 ^a	.838	.821	1.687	1.691

a. Predictors: (Constant), SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN , PELAYANAN PERPAJAKAN

b. Dependent Variable: KEPATUHAN PERPAJAKAN

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	412.579	3	137.526	48.352	.000 ^a
	Residual	79.640	28	2.844		
	Total	492.219	31			

a. Predictors: (Constant), SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN , PELAYANAN PERPAJAKAN

b. Dependent Variable: KEPATUHAN PERPAJAKAN

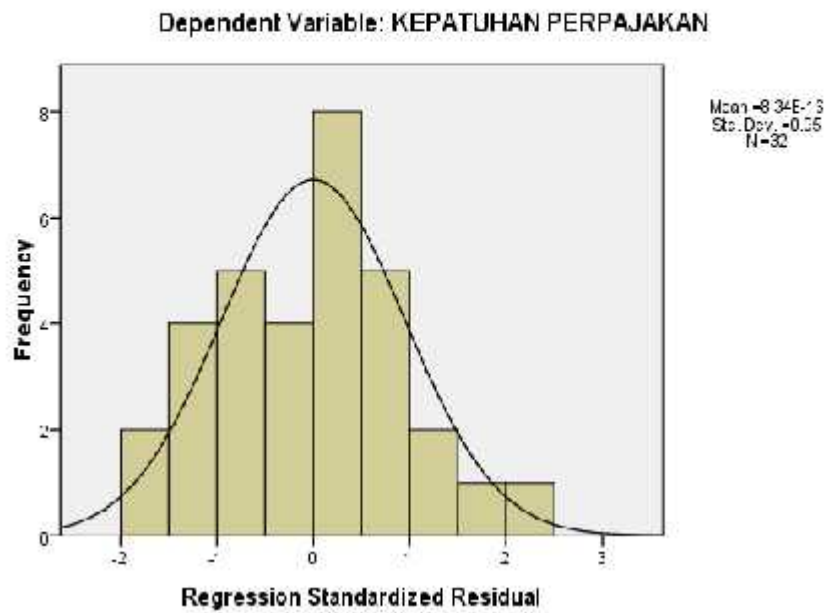
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.360	1.511		.238	.813		
PENGETAHUAN PERPAJAKAN	.252	.093	.304	2.718	.011	.462	2.165
PELAYANAN PERPAJAKAN	.348	.124	.341	2.810	.009	.393	2.546
SANKSI PAJAK	.380	.127	.374	2.999	.006	.371	2.696

a. Dependent Variable: KEPATUHAN PERPAJAKAN

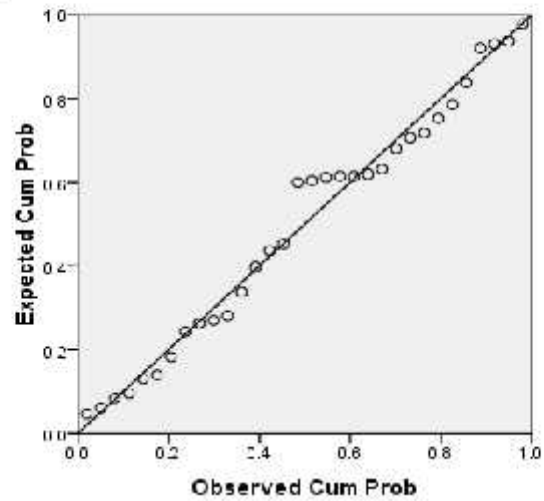
Charts

Histogram



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: KEPATUHAN PERPAJAKAN



Scatterplot

Dependent Variable: KEPATUHAN PERPAJAKAN

